

Pekerja Anak dan Industrialisasi

Fenomena pekerja anak merupakan persoalan serius yang harus diperbatikan dan selalu dicarikan alternatif jalan keluarnya oleh semua pihak. Bersamaan dengan proses industrialisasi yang tengah berjalan di Indonesia, perlu diwaspadai kemungkinan adanya peningkatan secara cepat — baik kuantitas maupun kualitas — permasalahan pekerja anak. Dengan asumsi bahwa permintaan pekerja (termasuk pekerja anak) akan semakin meningkat dengan semakin tingginya arus industrialisasi, maka permasalahan pekerja anak — di masa depan — dapat menjadi lebih serius.

Nachrowi D. Nachrowi

Peneliti Senior Lembaga Demografi FE-UI

Salahudin A. Muhidin

Asisten Peneliti Lembaga Demografi FE-UI



Nachrowi D. Nachrowi, lahir di Kudus, 2 Mei 1954; menyelesaikan S1 dari Universitas Indonesia jurusan Matematika, M.Sc dari Stanford University, California serta Ph.D dari The George Washington University, Washington, DC; selain aktif menulis dalam berbagai jurnal ilmiah, sekarang menjabat sebagai Pembantu Dekan FMIPA UI.

Salahudin A. Muhidin, lahir di Jakarta, 10 September 1970; menyelesaikan S1 dari Fakultas MIPA Institut Pertanian Bogor. Pernah menjadi anggota tim penelitian Aids dengan Tim kerja komisi AIDS Nasional, koordinator lapangan dan Anggota tim penelitian pertambangan dengan Deperindag dan anggota tim penelitian fertility dengan BKKBN.

Beberapa waktu terakhir, fenomena *pekerja anak* kembali menjadi topik yang ramai dibicarakan oleh semua kalangan. Tatkala orang membahas masalah di seputar anak, persoalan ini senantiasa muncul kembali ke permukaan. Perhatian terhadap masalah anak semakin mencuat setelah ditemukannya beberapa kasus tindak kekerasan dan penganiayaan yang menimpa beberapa anak jalanan.

Dalam kenyataan di lapangan, anak-anak yang tumbuh di jalan seringkali menjadi pekerja anak, karena mereka harus atau terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Pada umumnya, mereka hidup dalam keadaan yang sangat kurang akan kasih sayang. Selain itu, proses untuk pengembangan pribadi, seperti melalui pendidikan, sangat jarang mereka dapatkan. Kenyataan bahwa masih banyak jumlah pekerja anak di Indonesia mencerminkan masih buruknya nasib anak-anak di negeri ini.

Selain dianggap sebagai permasalahan sosial, pekerja anak sering dianggap pula sebagai permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan. Maraknya proses industrialisasi yang terjadi di beberapa negara berkembang pada akhir dekade ini, telah menyebabkan semakin banyaknya variasi permasalahan yang muncul dan dihadapi dalam aspek

ketenagakerjaan termasuk masalah pekerja anak.

Saat ini, masalah pekerja anak atau anak-anak yang terpaksa bekerja merupakan fenomena global. Masalah pekerja anak tidak hanya didominasi oleh negara-negara berkembang — seperti Indonesia, Thailand, Bangladesh, dan India — tetapi juga dimiliki oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Belanda, dan Inggris.

Perkiraan badan internasional yang khusus menangani masalah pekerja anak ILO-IPEC (*International Labour Organization-International Programme on the Elimination of Child Labour*) menyebutkan bahwa jumlah mereka, saat ini, sekitar 100-200 juta anak dan tersebar di seluruh penjuru dunia. Dari jumlah tersebut, lebih dari 80 persen berada di negara-negara berkembang, seperti di Amerika Latin sebanyak tujuh persen, di Asia sebanyak 18 persen, dan di Afrika 75 persen.

Far Eastern Economic Review mengemukakan bahwa untuk menghitung banyaknya jumlah pekerja anak secara pasti di suatu negara menghadapi kesulitan. Sering terjadi perbedaan angka antara hasil yang diperoleh dari sumber yang resmi dan sumber yang tidak resmi. Di kawasan Asia misalnya, menurut sumber resmi banyaknya pekerja anak di India ada sekitar 17,5 juta, Pakistan 6,5 juta, Bangladesh 6,2 juta, Thailand 1,6 juta, dan Indonesia 2,4 juta. Sedangkan menurut sumber yang tidak resmi, jumlahnya bisa mencapai tiga kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa memang tidak mudah untuk menjawab persoalan ini.

Pekerja Anak di Indonesia

Fenomena pekerja anak di Indonesia semula lebih berkaitan dengan tradisi atau budaya membantu orangtua. Sebagian besar orangtua beranggapan bahwa memberi pekerjaan kepada anak-anak merupakan upaya proses belajar, belajar menghargai kerja dan tanggung jawab. Selain dapat melatih dan memperkenalkan anak kepada dunia kerja, mereka juga berharap dapat membantu mengurangi beban kerja keluarga.

Namun demikian, sejalan dengan per-

kembangan waktu, fenomena anak yang bekerja banyak berkaitan erat dengan alasan ekonomi keluarga (masalah kemiskinan) dan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendapatan orangtua yang sangat sedikit tidak mampu lagi menutupi kebutuhan hidup keluarga sehingga memaksa mereka ikut bekerja. Di pihak lain, biaya pendidikan di Indonesia yang relatif tinggi telah ikut memperkecil kesempatan mereka untuk mendapat pendidikan.

Selain itu, masih banyak pekerja anak yang kadang-kadang harus melakukan pekerjaannya di luar batas waktu kerja normal dan batas kemampuannya. Kondisi ini menyebabkan pekerja anak kehilangan kesempatan yang seharusnya mereka alami pada masa kecilnya, seperti kesempatan bermain dan kesempatan belajar.

Untuk mengetahui jumlah anak Indonesia yang bekerja, beberapa kajian dan penelitian yang telah dilakukan banyak merujuk kepada data Survei Tenaga Kerja Nasional (SAKERNAS) dari BPS. Dengan menggunakan definisi bahwa pekerja anak adalah mereka yang berusia 10-14 tahun dan sedang bekerja paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu, maka diperoleh angka sekitar 2,0 juta anak pada 1994. Studi yang dilakukan oleh Azra² sebenarnya memberikan indikasi bahwa jumlah anak yang bekerja mungkin lebih besar daripada angka yang diperoleh dari hasil SAKERNAS, tergantung dari definisi "bekerja" yang digunakan.

Rendahnya hasil pencatatan jumlah anak yang bekerja dengan sistem tersebut dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Irwanto menyebutkan bahwa sedikitnya ada dua hal yang mempengaruhi hasil pencatatan.³ *Pertama*, kemungkinan informasi yang diperoleh adalah bukan dari pihak pertama, melainkan dari orangtua atau orang dewasa lainnya yang mewakili anak. *Kedua*, kemungkinan dilakukannya penelitian pada saat yang

2. Abuzar Azra (ed.), *Working Children in Bandung, Indonesia 1993* (Jakarta: Central Bureau of Statistics and ILO-IPEC, 1994).

3. Lihat, Irwanto, *Kajian Literatur dan Penelitian mengenai Pekerja Anak sejak Pengembangan Rencana Kerja IPEC 1993* (Jakarta: IPEC/ILO, 1996).

1. Lihat *FEER*, 7/3/1996

tidak tepat, terutama jika pada minggu sebelumnya adalah hari libur besar. Selain itu banyak anak yang bekerja membantu orangtua di rumah atau di tempat lain yang bersifat ekonomis tetapi tidak dilaporkan (*under reported*).

Penelitian lain mencoba menggunakan nilai *Net Enrollment Ratio* (NER) sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sebagai upaya pendekatan dalam menghitung jumlah pekerja anak.⁴ Pada 1993, diperoleh angka 91,5 persen untuk SD dan 40,0 persen untuk SMP. Jika dihitung dengan angka absolut maka jumlah anak usia sekolah (7-15 tahun) yang tidak berada di sekolah lagi akan berjumlah sekitar 9,5 juta anak. Dari sejumlah anak dengan status tidak bersekolah tersebut, tentu saja beragam kegiatan yang dilakukannya, di antaranya melakukan pekerjaan yang bernilai ekonomis (sebagai pekerja/buruh industri) atau membantu pekerjaan orangtua (pekerja keluarga/tanpa bayaran).

Untuk dapat mengetahui secara lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pasar kerja anak, kita harus melihat masalahnya dari perspektif yang lengkap. *Pertama*, dari sisi penawaran. Ketersediaan tenaga kerja anak sangat tergantung pada partisipasi anak di sekolah dan ketersediaan waktu luang mereka — terutama untuk anak-anak yang bekerja paruh waktu. Selain itu, faktor orangtua sangat menentukan pula keputusan anak untuk bekerja.

Beberapa hasil penelitian yang ada menyimpulkan bahwa alasan terpenting yang menyebabkan munculnya pekerja anak adalah faktor kemiskinan.⁵ Thijs menambahkan bahwa hampir 50 persen dari orangtua yang dijadikan sampel penelitian mengatakan bahwa faktor ekonomi adalah alasan utama mengapa mereka mengizinkan anaknya untuk

bekerja.⁶ Dari hasil studi Azra diperoleh gambaran bahwa adanya pendapatan yang diterima oleh pekerja anak ini sangat berharga artinya untuk keluarga mereka, terutama mereka yang tinggal di pedesaan.⁷ Selain itu, Azra mengemukakan bahwa ada pendapat dari para orangtua yang menyatakan investasi dalam bidang pendidikan kurang membawa hasil. Hal ini mereka kaitkan dengan besarnya pendapatan yang diterima oleh pekerja lulusan SD dan SMP ternyata tidak banyak berbeda.

Kedua, dari sisi permintaan. Permintaan terhadap pekerja anak sangat ditentukan oleh adanya kebutuhan perusahaan. Sebagian besar industri yang mempekerjakan anak ternyata memiliki alasan karena upah mereka yang relatif murah dan kecenderungan dari sikap mereka yang penurut (tidak banyak menuntut). Selain itu, mereka melihat adanya beberapa pekerjaan yang cocok untuk pekerja anak. Misalnya, jenis pekerjaan yang ringan dan sederhana tetapi tidak ada (tidak banyak) pekerja dewasa yang mau mengerjakan pekerjaan tersebut.

Nachrowi dan kawan-kawan mendapatkan bahwa *fluktuasi produksi* dari suatu industri ternyata ikut pula mempengaruhi permintaan terhadap pekerja anak.⁸ Kasus seperti ini ditemukan pada perusahaan industri tekstil (*garment*) dan industri rotan di Bandung dan Cirebon, Jawa Barat. Pada saat sekitar hari raya biasanya terjadi permintaan yang sangat tinggi terhadap produksi tekstil dan keranjang rotan. Peningkatan permintaan ini mendorong para pengusaha untuk berusaha memenuhinya dengan menaikkan tingkat produksinya. Dengan demikian, kebutuhan akan pekerja borongan atau pekerja paruh waktu menjadi sangat tinggi. Pekerja borongan (subkontrak) dan pekerja paruh waktu sangat diminati karena tidak akan membebani perusahaan ketika terjadi penurunan permintaan terhadap output.

Di samping melakukan perekrutan pekerja luar, kadang-kadang para pengusaha (kecil) melibatkan anggota keluarganya (ter-

4. Jiyono, *Background Study on Child Labor, Educational Policies and Achievement in Indonesia* (1993, unpublished).

5. Lihat, Guy Thijs, *Child Labour in Indonesia* (Geneva: International Labour Organization, 1994); Pandji Putranto, "Berbagai Upaya Penanggulangan Pekerja Anak" makalah disampaikan pada *Seminar KOWANI*, Jakarta, 14 November 1995; dan Nachrowi D. Nachrowi *et al.*, *Child Labour in the Manufacturing Industri - Indonesia: Final Report* (Jakarta: Demographic Institute, FEUI, 1996).

6. Lihat, Thijs, *op. cit.*

7. Lihat, Azra, *op. cit.*

8. Lihat, Nachrowi, *op. cit.*

masuk istri dan anak-anaknya) untuk mengejar target produksi. Keterlibatan mereka dalam proses produksi ditujukan untuk memperoleh penghasilan tambahan dan menghemat ongkos produksi, karena pekerja keluarga pada umumnya tidak dibayar secara langsung. Dengan demikian, "masih adanya" permintaan terhadap tenaga kerja anak ini masih memberikan peluang terciptanya pasar kerja anak di Indonesia.

Sedikitnya terdapat enam alasan utama mengapa permasalahan pekerja anak ini masih dan selalu dijadikan pembahasan penting di Indonesia. *Pertama*, meningkatnya jumlah pekerja anak akan menimbulkan dinamika tersendiri dalam proses pembangunan sumber daya manusia selama dupuluh lima tahun mendatang (PJP II).

Kedua, upaya mengantisipasi secara dini permasalahan yang mungkin timbul sebagai akibat semakin bertambahnya jumlah absolut pekerja anak dari tahun ke tahun dan permasalahan ketenagakerjaan yang mungkin muncul sebagai akibat adanya persaingan dan peningkatan penanaman modal dalam sektor industri di Indonesia.

Ketiga, era ekonomi global telah mengubah sistem perdagangan dunia internasional. Negara-negara maju semakin *concern* dengan kesejahteraan dan kehidupan buruh. Salah satunya adalah tentang pekerja anak. Pada masa sebelumnya, melimpahnya sumber daya, murahnya upah buruh, dan pemakaian buruh anak di sektor industri mungkin masih dapat dijadikan sebagai daya tarik untuk investor. Namun demikian, sekarang dan masa selanjutnya semua keunggulan bangsa seperti itu tidak dapat lagi dijadikan "penarik" para investor. Pengalaman dari beberapa negara menunjukkan bahwa negara-negara tujuan impor sudah memasukkan konsep *social dumping* atau *social closed* dalam traktat-traktat perjanjian ekonomi. Pemakaian buruh murah dan pekerja anak menjadi "haram" dalam sistem ketenagakerjaannya.

Keempat, melonjaknya jumlah pekerja anak berimplikasi terhadap pasar tenaga kerja. Penggunaan pekerja anak dalam suatu perusahaan ternyata berdampak kepada pengurangan kesempatan kerja pada pekerja dewasa. Pengalaman yang ada di lapangan

menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja anak tidak jauh berbeda dengan produktivitas tenaga kerja dewasa. Dari segi ekonomi, perusahaan yang telah mempekerjakan buruh anak sebenarnya memperoleh keuntungan yang banyak. Penekanan biaya dapat dilakukan oleh perusahaan dengan membayarkan upah tenaga kerja yang lebih rendah. Selain itu, pekerja anak dianggap lebih mudah diatur dan tidak terlalu menuntut—bahkan terkadang tidak mengetahui, hak-hak yang seharusnya mereka terima sebagai pekerja.

Kelima, banyak perusahaan industri manufaktur yang mempergunakan tenaga kerja di bawah umur menjadi isu yang sering diperdebatkan belakangan ini. Masih belum ada kesesuaian pendapat tentang kehadiran pekerja di bawah umur. Di satu sisi banyak yang berpendapat bahwa perusahaan terlalu "mengksploitasi" pekerja di bawah umur tanpa ada upaya perbaikan nasib dan kesejahteraan mereka. Di pihak lain, seringkali pekerja ini memiliki curahan waktu kerja yang jauh melebihi dari ketentuan jam kerja yang ada.

Keenam, masih banyak pekerja di bawah umur yang harus bekerja tanpa mengetahui hak-hak yang mereka miliki, seperti hak cuti dan beberapa hak lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan mereka. Masalah upah juga sering dikaitkan dengan pekerja di bawah umur. Tingkat upah yang mereka terima terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, bahkan upah yang mereka terima kadang-kadang tidak mencerminkan beban kerja yang mereka lakukan.

Masih banyaknya agenda persoalan yang belum terjawab dan menyelimuti sekitar permasalahan pekerja anak, menyebabkan perlu adanya penanganan secara lebih serius dari pihak yang terkait. Penanganannya tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak, melainkan harus melibatkan semua pihak terkait dan lintas sektoral.

Pekerja Anak di Tengah Perkembangan Industrialisasi

Dalam beberapa tahun terakhir, bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara mengalami

perkembangan ekonomi yang cukup pesat, terutama dalam bidang industri manufaktur. Selain itu, negara-negara di kawasan ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, dan diperkirakan sangat berpotensi sebagai tujuan investasi dalam sektor industri manufaktur.

Meskipun demikian, strategi pertumbuhan industri di kawasan ini sering mendapat kritikan dari para ahli ekonomi, terutama mereka yang berasal dari negara maju. Protes utama yang dilontarkan berfokus pada masalah keunggulan komparatif industri. Para ekonom tersebut menyatakan bahwa industri di wilayah ini seharusnya jangan terlalu bertumpu (mengandalkan) pada limpahan pekerja — dengan upah — murah, seperti pekerja anak. Pada jangka waktu mendatang, keunggulan suatu industri akan didasarkan kepada keunggulan inovasi dan pemanfaatan teknologi baru yang padat modal.

Kritikan kedua ditujukan pada pola pengembangan industri. Mereka menyatakan bahwa industri-industri di kawasan ini banyak yang hanya bertindak sebagai "tukang jahit" saja. Artinya, negara-negara eksportir hanya memanfaatkan murahness tenaga kerja tanpa diiringi upaya sungguh-sungguh untuk melakukan alih (*transfer*) teknologi.

Kritikan para ahli tersebut mulai terasa pada awal era globalisasi atau perdagangan bebas (*free trade*). Negara-negara maju sebagai konsumen produk industri manufaktur dari kawasan ini mulai mempersoalkan dampak kehadiran industri terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu isu yang mereka persoalkan adalah pemakaian pekerja anak.

Untuk mengetahui bagaimana kecenderungan yang terjadi terhadap pekerja anak di tengah perkembangan industrialisasi di Indonesia, perlu kiranya dilakukan telaah awal kepada data yang lebih makro. Telaah dapat dimulai dengan data ketenagakerjaan secara umum dan kaitannya dengan proses industrialisasi di Indonesia.

Tabel 1 menunjukkan kecenderungan perubahan yang terjadi pada beberapa

TABEL 1. Profil Tenaga Kerja di Indonesia:1971-1994

Indikator	1971	1980	1985	1990	1994
Jumlah Pekerja (juta)	37,6	51,6	62,5	71,6	82,0
	%	%	%	%	%
Pertanian	65,9	55,9	54,7	49,2	46,1
Industri	10,1	13,3	13,4	16,8	18,7
Jasa	24,0	30,8	31,9	34,0	35,2
Pedesaan	85,2	81,1	78,4	73,3	70,4
Perempuan	33,2	32,8	36,0	35,8	38,7
di Pulau Jawa	65,7	64,1	62,4	61,6	59,8
Tidak Sekolah	42,7	29,6	21,7	17,6	11,4
Tidak Tamat SD	28,5	37,6	34,4	28,0	23,8
Tamat SD	21,8	21,2	27,6	31,7	37,5
Tamat SMP+	7,0	11,6	16,3	22,7	27,3

Sumber: Diolah dari BPS (1983, 1987, 1992, dan 1995).

indikator ketenagakerjaan di Indonesia. Jika dilihat dari konsentrasi jumlah atau proporsi pekerja yang bekerja di setiap sektornya, maka terlihat adanya pergeseran (*shifting*) konsentrasi pekerja dari sektor pertanian menuju sektor jasa dan industri. Meskipun demikian, nilai absolutnya tetap mengalami kenaikan. Pada 1971, persentase pekerja di sektor pertanian masih sekitar 65,9 persen (24,8 juta), sedangkan pada akhir 1994 persentasenya telah menurun menjadi sekitar 46,1 persen (37,8 juta).

Bersamaan dengan semakin besarnya angka urbanisasi (persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan), para pekerja pun cenderung semakin banyak yang tinggal di daerah perkotaan. Pada 1971, pekerja yang tinggal di pedesaan sekitar 85,2 persen, dan pada 1994 menjadi lebih rendah (menurun) menjadi sekitar 70,4 persen. Dilihat dari jenis kelamin, partisipasi pekerja perempuan di pasar kerja semakin meningkat, berarti semakin banyak pekerja perempuan yang memasuki pasar kerja di Indonesia.

Dari segi pendidikan, ada indikasi yang menunjukkan bahwa para pekerja di Indonesia semakin terdidik. Kondisi ini terlihat dari semakin menurunnya proporsi pekerja yang tidak pernah sekolah dan semakin menaikinya proporsi pekerja yang tamat SMP+. Pada 1971, pekerja yang menamatkan pendidikan SMP+ sekitar 7,0 persen,

kemudian pada 1980 menjadi sekitar 11,6 persen, dan terus menaik pada 1994 yaitu sekitar 27,3 persen. Kecenderungan pekerja yang semakin terdidik ini — terutama pada pendidikan dasar — diharapkan akan semakin meningkat dengan adanya kesadaran wajib belajar yang tengah dilakukan di Indonesia.

Bagaimana perkembangan ketenagakerjaan pada pasar kerja pekerja anak? Dengan mengasumsikan bahwa perkembangan industrialisasi di Indonesia mulai berkembang pesat pada tahap pelita IV, maka akan dilihat perkembangan yang terjadi pada pasar kerja pekerja anak sejak tahun-tahun tersebut.

Pada Tabel 2 ditunjukkan tentang kecenderungan perubahan yang terjadi pada beberapa indikator ketenagakerjaan pekerja anak. Dari data tersebut terlihat gambaran bahwa perkembangan yang terjadi pada pekerja anak hampir sama atau setara dengan perkembangan yang terjadi pada ketenagakerjaan secara umum.

Dari segi jumlah dan konsentrasi pekerja, terlihat adanya gejala pergeseran (*shifting*) pekerja anak dari sektor pertanian menuju sektor jasa dan industri. Bersamaan dengan proses industrialisasi, lingkup pekerjaan anak-anak mengalami pergeseran. Jika pada masa pra industrialisasi, banyak anak-anak bekerja di sektor pertanian, maka dengan makin maraknya industrialisasi sebagian dari mereka menyerbu sektor industri.

Jika pada 1989, persentase pekerja anak yang bekerja di sektor pertanian sekitar 79,2 persen (2,1 juta) maka pada 1994 mengalami penurunan menjadi sekitar 67,4 persen (1,3 juta). Sedangkan pada sektor industri dan jasa mengalami peningkatan dari 9,5 persen dan 11,4 persen pada 1989 menjadi 14,2 persen dan 18,2 persen pada 1994.

Industri manufaktur merupakan salah satu sub sektor formal yang paling menarik perhatian pekerja anak yang memasuki sektor industri. Pada 1989, pekerja anak yang memasuki sektor industri manufaktur sekitar 8,7 persen, kemudian pada 1991 menjadi sekitar 10,2 persen, dan menaik terus menjadi sekitar 12,6 persen pada 1994. Dari sebagian besar sektor industri yang dimasuki oleh pekerja anak, industri dengan skala kecil dan skala

menengah merupakan incaran utama mereka. Hal ini dapat terlihat dari masih besarnya pekerja anak yang bekerja dengan status sebagai pekerja keluarga (rumahan) dan buruh.

TABEL 2. Profil Penduduk Usia 10-14 Tahun yang Bekerja: Indonesia 1989-1994

Indikator	1989	1991	1994
Jumlah Pekerja (juta)	2,68	2,19	2,00
	%	%	%
Pertanian	79,2	71,3	67,4
Industri	9,5	11,5	14,2
Jasa	11,4	16,7	18,2
lainnya	0,2	0,4	0,2
Pedesaan	94,4	89,8	87,5
Perempuan	41,8	40,8	41,4
di P. Jawa	52,7	53,2	47,2
Pekerja Keluarga	84,0	78,7	77,3
Buruh	9,6	13,4	13,7
Tidak Sekolah	3,2	2,7	3,2
Tidak/belum Tamat SD	55,7	50,3	46,0
Tamat SD	40,4	45,8	49,4
Tamat SMP	0,7	1,2	1,3

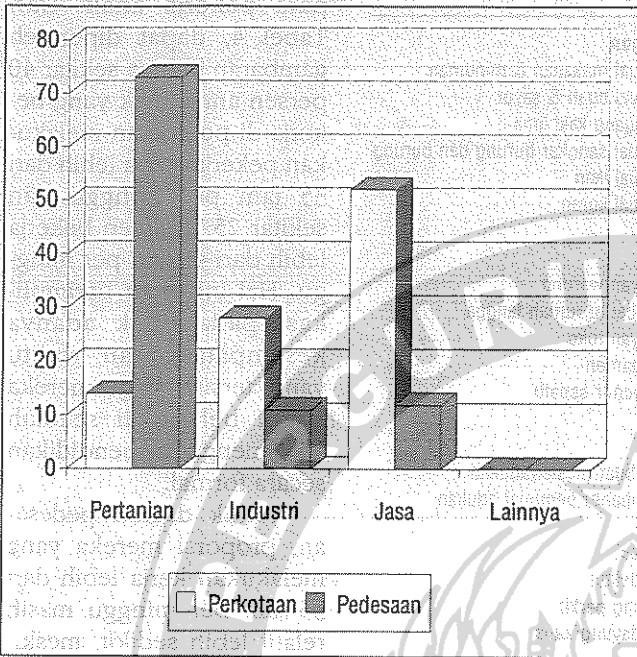
Sumber: Sakernas 1989, 1991, dan 1994.

Dari data Sakernas 1994, diperoleh gambaran bahwa pekerja anak yang bertempat tinggal di perkotaan, lebih banyak memasuki pasar kerja sektor jasa (52,4 persen), terutama untuk sektor perdagangan (33,9 persen). Lihat Gambar 1. Status pekerja anak di perkotaan lebih dominan sebagai pekerja keluarga (56,0 persen) daripada bekerja sebagai buruh (35,9 persen).

Ditinjau dari jenis kelamin, pekerja anak laki-laki lebih banyak bekerja pada sektor pertanian. Pada tahun-tahun 1989, 1991, dan 1994 persentase pekerja anak laki-laki di sektor pertanian secara berurut adalah sebagai berikut: 86,8 persen, 79,7 persen dan 77,0 persen. Sedangkan untuk pekerja anak perempuan sekitar 68,6 persen, 58,3 persen dan 53,8 persen.

Sedangkan untuk sektor industri dan jasa, terutama untuk sub sektor perdagangan dan industri manufaktur, persentase pekerja anak perempuan lebih banyak dibandingkan dengan pekerja anak laki-laki. Pekerja anak

GAMBAR 1. Proporsi Pekerja Anak Menurut Sektor dan Tempat Tinggal: Indonesia 1994



perempuan di sektor industri dan jasa pada 1989 sekitar 15,9 persen dan 15,5 persen, kemudian pada 1994 menjadi sekitar 19,9 persen dan 26,0 persen.

Kondisi seperti ini masih dimungkinkan karena kebutuhan atau permintaan pekerja masih didasarkan atas jenis pekerjaan yang dilakukan. Di sektor pertanian, misalnya, pekerjaan yang dilakukan masih banyak didominasi oleh pekerjaan yang banyak membutuhkan tenaga, dan umumnya banyak dilakukan oleh pekerja laki-laki.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerja anak ternyata dapat masuk pada setiap sektor. Dengan kata lain tidak ada segmen pasar kerja tertentu untuk pekerja anak. Mereka terlibat dalam berbagai macam jenis pekerjaan. Meskipun demikian, jenis-jenis pekerjaan yang dilakukannya sebagian besar terbatas pada kemampuan mereka sebagai pekerja anak. Meskipun demikian, kadangkala kadang ditemui pula pekerja anak yang harus melakukan jenis pekerjaan orang dewasa.

Hasil studi yang dilakukan oleh Benyamin White dan Indrasari Tjandraningsih di Jawa Barat menambah bukti bahwa tidak ada segmentasi pasar tenaga kerja yang jelas untuk

pekerja anak menurut kategori usaha.⁹ Mereka dengan mudah memasuki sektor-sektor industri, meskipun tetap membutuhkan dukungan kerabat yang lebih dulu bekerja di tempat yang sama.

Dari aspek tempat tinggal, terjadi penurunan proporsi pada anak yang bekerja di pedesaan, dan sebaliknya terjadi kenaikan proporsi pada anak-anak bekerja yang tinggal di daerah perkotaan. Pada 1989, proporsi pekerja anak di pedesaan sekitar 93,0 persen, menurun menjadi 89,5 persen pada 1991, dan menjadi 87,5 persen pada 1994.

Penurunan proporsi pekerja anak di pedesaan sangat erat kaitannya dengan fenomena urbanisasi. Meskipun saat ini proporsi pekerja anak di perkotaan belum menunjukkan angka yang terlalu besar, namun dapat dibayangkan bahwa proporsi tersebut akan semakin meningkat

bersamaan dengan semakin besarnya angka urbanisasi di Indonesia. Hal ini dapat dimungkinkan karena, secara rata-rata, seorang anak seringkali tinggal bersama orangtua atau keluarganya. Dengan demikian, semakin banyak penduduk yang tinggal di perkotaan maka pekerja anak pun semakin banyak.

Partisipasi pekerja anak baik perempuan maupun laki-laki cenderung tidak mengalami perubahan. Namun demikian, partisipasi pekerja anak laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja anak perempuan. Hasil data Sakernas 1994 menunjukkan perbandingan antara pekerja anak perempuan dan anak laki-laki adalah 41,8 persen berbanding 58,2 persen.

Dari segi pendidikan, para pekerja anak pun sudah semakin terdidik. Kondisi ini terlihat dari semakin menurunnya proporsi pekerja yang tidak pernah sekolah dan meningkatnya pekerja berpendidikan (SD dan SMP). Kecenderungan pekerja yang semakin terdidik ini menunjukkan gejala

9. Benjamin White dan Indrasari Tjandraningsih, *Child and Juvenile, Employment in Rural Nonsfarm activities* (Bandung: Preliminary Result, 1991).

TABEL 3. Sektor dan Jenis Pekerjaan yang Dimasuki oleh Pekerja Anak

Sektor	Sektor
Peranian	Perdagangan
- Pemetik daun teh	- Penjual makanan & minuman
- Pekerja pabrik teh	- Penjual buah & sayur
- Pekerja di ladang	- Pedagang kaki lima
- Pemotong rumput	- Penjual sangkar burung dan burung
- Pengumpul kayu bakar	- Penjual ikan
- Peternak/penggembala ternak	- Penjual koran
- Pemancing/penangkap ikan	
- Penjual air Industri	Jasa
- Operator mesin	- Pelayan warung
- Percetakan tekstil	- Pembantu rumah tangga
- Bagian tenun	- Pelayan toko
- Pabrik gelas	- Pengamen
- Bekerja di pabrik roti	- Penyemir sepatu
- Bekerja di pabrik kancing	
- Bekerja di pabrik sepatu	Bangunan
- Bekerja di pabrik jala	- Pembuat plester/adukan
- Bekerja di pabrik kue	- Membantu pembuat adukan
- Bekerja di pabrik kaus kaki	
- Bekerja di pabrik mebel	Transportasi
- Bekerja di penggilingan padi	- Kondक्टर
- Pembuat batu-bata merah	- Tukang parkir
- Pembuat genting	- Pendayung kapal

Sumber: ILO, Child Labour in Indonesia, 1994.

bahwa kesadaran terhadap pendidikan sudah mulai meningkat. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap faktor pendidikan anak diharapkan akan terus bertambah dengan adanya program wajib belajar 9 tahun yang tengah dilakukan.

Kondisi Pekerja Anak

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dengan kondisi pekerja anak adalah jam kerja, tingkat upah, jenis pekerjaan, dan lingkungan kerja pekerja anak.

Jam kerja

Sejauh mana anak terlibat sebagai pekerja/buruh dapat dilihat dari banyak waktu yang mereka curahkan untuk pekerjaan tersebut. Bank Dunia mencatat seperempat dari pekerja anak di perkotaan bekerja lebih dari 45 jam, dan sepertiga dari mereka bekerja lebih dari 60 jam per minggu.¹⁰

Perkembangan di Indonesia (Sakernas 1994) menunjukkan bahwa masih terlihat

adanya pencurahan waktu yang sangat tinggi oleh para pekerja anak. Dari Tabel 4, dapat diperoleh gambaran bahwa sekitar 40 persen anak-anak yang bekerja di perkotaan melakukan pekerjaannya lebih dari 35 jam per minggu dan sekitar 25,1 persen bekerja lebih dari 45 jam per minggu. Hal ini tentu berimplikasi pada tidak adanya kesempatan atau waktu yang tersisa bagi mereka untuk belajar di sekolah atau mengikuti pendidikan secara formal.

Untuk daerah pedesaan, proporsi mereka yang melakukan kerja lebih dari 35 jam per minggu masih relatif lebih sedikit, meskipun secara absolut nilainya lebih banyak. Kondisi ini sudah melebihi ketentuan rata-rata kerja normal untuk orang dewasa, yaitu 40 jam per minggu. Apalagi jika dibandingkan dengan ketentuan konvensi ILO No. 138/1973, bahwa anak-anak tidak diperbolehkan bekerja lebih dari 4 jam sehari atau 20 jam per minggu.

TABEL 4. Penduduk Usia 10-14 Tahun yang Bekerja Menurut Jam Kerja Selama Seminggu: Indonesia, 1994

Jam Kerja	Perkotaan	Pedesaan	Total
Total	%	%	%
0	0.5	1.5	1.4
1 - 9	10.5	16.8	16.0
10 - 14	18.8	23.0	22.5
15 - 24	21.9	29.5	28.6
25 - 34	10.3	12.1	11.9
35 - 44	12.8	8.6	9.1
45 - 59	17.0	7.1	8.3
60+	8.1	1.4	2.2
	100.0	100.0	100.0

Sumber: BPS (1995)

Tingkat upah

Jam kerja yang panjang mungkin menjadi pilihan, apabila upah yang diterima oleh

10. Lihat, World Bank, *Indonesia: Dimension of Growth* (Washington D.C.: The World Bank, 1996).

pekerja anak sesuai dengan curahan waktu yang mereka berikan. Namun kenyataannya tidak demikian. Dari beberapa penelitian yang dilakukan, ternyata tidak ada hubungan yang signifikan antara curahan waktu kerja dengan upah yang diterima.

TABEL 5. Penduduk Usia 10-14 Menurut Lapangan Pekerjaan: Indonesia 1993

Lapangan Pekerjaan Utama	Rata-rata Jam kerja (1 minggu)	Rata-rata Upah, Rp (1 Bulan)
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	36	43.796
2. Pertambangan dan Penggalian	36	50.149
3. Industri pengolahan	40	55.317
4. Listrik, Gas dan Air	46	103.294
5. Bangunan	44	85.318
6. Perdagangan	48	50.137
7. Angkutan, dan jasa komunikasi	49	69.417
8. Keuangan, asuransi	29	45.000
9. Jasa kemasyarakatan	56	46.476
Rata-rata	45	52.137

Sumber: BPS (1994).

Minimnya kekuatan fisik dan keterampilan yang mereka miliki telah menyebabkan mereka tidak dihargai. Mereka tidak memiliki kemampuan tawar menawar. Karena posisi mereka yang lemah dan rendah tersebut, maka tidak jarang terjadi tindakan-tindakan eksploitatif dilakukan terhadap mereka. Dalam hal upah misalnya. Pada Tabel 5, terlihat bahwa tidak ada hubungan antara jam kerja dan upah yang mereka dapatkan.

Pekerja anak di sektor keuangan, dengan jam kerja 29 jam per minggu, memperoleh upah sekitar Rp 45.000. Sedangkan mereka yang bekerja di sektor pertanian atau jasa kemasyarakatan dengan jam kerja sekitar 36 jam atau 56 jam per minggu, menerima upah sebesar Rp 43.796 dan Rp 46.476. Bahkan, jika dibandingkan dengan nilai UMR pada tahun yang sama (1993) yaitu sebesar Rp 59.825/bulan, maka nilai tersebut jauh di bawahnya.

Tidak adanya kaitan yang signifikan serta tidak adanya segmentasi pasar kerja meng-

akibatkan pekerja anak terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa. Padahal pekerja anak tidak terdaftar secara resmi, sehingga perusahaan memiliki keleluasaan untuk tidak terikat dengan ketentuan upah minimum.

Walaupun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, namun belum ada UU atau peraturan di Indonesia yang secara langsung melindungi buruh anak di sektor informal. Di sektor formal pun sampai saat ini belum terjadi kemajuan yang berarti, sampai sekarang Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO No. 59 mengenai usia kerja minimum yang diperbolehkan untuk bekerja di sektor industri dan konvensi ILO No. 138 mengenai usia anak untuk bekerja.

TABEL 6. Persentase Pekerja Usia 10-14 Tahun Menurut Upah/Gaji Bersih Selama Sebulan: Indonesia, 1993

Upah/Gaji Sebulan	Laki-laki	Perempuan	Total
< 10.000	1,70	3,43	2,60
10.000 - 19.999	9,59	7,38	8,43
20.000 - 29.999	10,13	15,30	12,83
30.000 - 39.999	16,11	24,60	20,54
40.000 - 49.999	12,66	18,70	15,81
50.000 - 74.999	18,87	21,83	20,42
75.000 - 99.999	16,66	5,14	10,65
100.000 - 149.000	10,44	2,47	6,28
150.000 - 199.999	1,88	0,62	1,22
200.000 - 249.000	1,07	0,31	0,68
250.000 +	0,89	0,22	0,54
Jumlah	100,0	100,0	100,0

Sumber: BPS (1994), Sakernas 1993.

Bagaimanakah perbandingan upah pekerja anak dengan nilai Upah Minimum Regional/UMR? Dari data pada Tabel 6, diperoleh nilai median untuk upah pekerja anak laki-laki sebesar Rp 50.000/bulan, dan untuk pekerja anak perempuan sebesar Rp 40.000/bulan. Sedangkan secara total didapat nilai Rp 45.000/bulan. Jika dibandingkan dengan UMR 1993, maka upah pekerja anak tersebut masih jauh di bawah nilai UMR. Untuk pekerja anak laki-laki terdapat selisih sekitar Rp 9.825 dan untuk pekerja anak perempuan selisihnya jauh lebih besar yaitu sekitar Rp 19.825.

Lingkungan kerja

Selain jam kerja yang panjang dan tingkat upah yang kecil, tidak sedikit anak-anak yang bekerja dalam lingkungan dan kondisi yang berbahaya. Lingkungan seperti ini dapat ditemui pada anak-anak yang bekerja di industri-industri yang menggunakan bahan kimia beracun (industri tekstil, cat, mainan anak, dan sepatu), anak-anak yang bekerja mengangkat barang-barang yang berat (bekerja di pasar, bangunan, dan pertanian), dan tempat-tempat lain di mana terpapar alat-alat yang berbahaya atau lingkungan yang kurang sehat.¹¹

Pertumbuhan Pekerja Anak

Berbicara masalah jumlah dan pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia, kita dapat menghubungkannya dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk. Pada Tabel 7 terlihat bahwa penurunan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia diikuti pula oleh penurunan pertumbuhan jumlah tenaga kerja, angkatan kerja, dan *employment*—dihitung dari jumlah orang yang bekerja.

TABEL 7. Angka Pertumbuhan Penduduk, Tenaga Kerja, dan Angkatan Kerja: Indonesia, 1980-2020

Tahun	Penduduk	Tenaga Kerja	Angkatan Kerja	Employment
1971-1980	2,30	3,11	3,34	3,51
1980-1990	1,97	2,58	3,44	3,25
1990-1995	1,66	2,43	3,05	2,90
1995-2000	1,46	1,81	2,78	2,70
2000-2005	1,23	1,69	2,40	2,25
2005-2010	1,07	1,44	2,05	1,88
2010-2015	0,88	1,19	1,75	1,54
2015-2020	0,68	1,00	1,41	1,15

Sumber: a. BPS (1991)

b. Aris Ananta dan Evi Nurvidya Anwar (1994)¹²

Angka pertumbuhan *employment* per tahun menurun dari 3,25 persen pada periode 1980-1990 menjadi 2,90 persen pada 1990-

1995, dan 1,15 persen pada periode 2015-2020. Turunnya angka pertumbuhan *employment* ini tidak berarti penurunan dalam pertumbuhan ekonomi. Penurunan ini sebagian besar diakibatkan oleh suatu mata rantai. Diawali oleh penurunan pertumbuhan jumlah penduduk, disusul oleh penurunan jumlah tenaga kerja, dan kemudian oleh penurunan jumlah angkatan kerja. Bila komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin berubah, maka orang yang berpotensi untuk masuk ke pasar kerja pun berubah.

Dengan asumsi bahwa proporsi penduduk usia 10-14 tahun terhadap seluruh jumlah penduduk relatif tetap pada beberapa tahun pengamatan, yaitu sekitar 12 persen, maka dapat diduga bahwa pola pertumbuhan penduduk usia 10-14 tahun akan mengikuti pola pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Pola pertumbuhan penduduk usia tersebut mengalami kecenderungan yang menurun pula.

Sejalan dengan penurunan angka pertumbuhan penduduk, Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK, *Labor Force Participation Rate*) mengalami kecenderungan yang menurun pula. Penurunan ini terlihat sejak 1971 sampai 1993, pada kelompok usia 10-14 tahun. Lihat Tabel 8.a.

TABEL 8.a. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Usia 10-14, Indonesia 1971-1993

	1971	1980	1989	1990	1991	1992	1993
Perkotaan	7,1	3,7	2,5	3,3	3,5	3,3	3,2
Pedesaan	18,1	13,2	15,5	14,2	13,3	13,7	12,7
Perkotaan +Pedesaan	16,0	11,1	12,0	11,0	10,3	10,4	9,5

Sumber: BPS, 1995.

Data mengenai APAK kelompok usia anak sejak tahun 1971-1993 menunjukkan angka yang konsisten. Persentase anak-anak yang terjun ke dalam pasar kerja di pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Situasi ini dimungkinkan karena mayoritas lapangan pekerjaan di sektor pertanian (di pedesaan) relatif lebih mudah untuk dikerjakan. Selain itu, pada periode tersebut se-

11. International Labour Organization, *Child Labour in Indonesia* (Geneva, 1994).

12. Lihat, Aris Ananta dan Evi Nurvidya Anwar, *Projection of Indonesian Population and Labor Force 1995-2025* (Jakarta: Demographic Institute, FEUI, 1994).

bagian besar penduduk Indonesia masih lebih banyak yang tinggal di daerah pedesaan. Kecenderungan penurunan nilai APAK ini diproyeksikan akan terus berlanjut sampai tahun 2025. Lihat Tabel 8.b.

TABEL 8.b. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Usia 10-14, Indonesia 1995-2025

	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2025
Perempuan	8,55	8,25	7,97	7,70	7,43	7,18	6,93
Laki-laki	11,40	10,93	10,48	10,05	9,64	9,25	8,87
Perempuan +Laki-laki	10,01	9,63	9,25	8,90	8,56	8,23	7,92

Sumber: Ananta dan Anwar, 1994.

Besarnya perubahan nilai APAK usia anak sangat dipengaruhi oleh adanya perbaikan keadaan sosial ekonomi bangsa Indonesia. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap aspek hukum-hukum ketenagakerjaan khususnya, serta kesadaran dari orangtua terhadap usia wajib belajar bagi anak ikut serta mempengaruhi perubahan nilai APAK usia anak.

Permasalahan kehidupan dan masa depan pekerja anak dalam sektor industri sampai saat ini masih menjadi topik penting dalam studi-studi yang dilakukan oleh pemerintah dan beberapa institusi lainnya. Beberapa pembicaraan telah dilakukan untuk membahas masalah ini dengan beberapa pendekatan yang berbeda. Pada satu sisi, pembicaraan diarahkan kepada usaha melihat bagaimana kondisi umum pekerja anak dari segi kualitas, seperti tinjauan secara demografis, ekonomi, dan sosial. Di pihak lain, pembahasan dikaitkan dengan kualitas individu dalam arti kehidupan atau jenis pekerjaan seperti apa yang dijalani oleh pekerja anak.

Perlindungan Hukum Pekerja Anak

Selain dilihat dari sisi upah dan jam kerja yang dilakukan oleh pekerja anak, tinjauan terhadap aspek hukum juga sangat penting dilakukan. Berikut ini akan dibahas tinjauan hukum tentang ketenagakerjaan yang sudah

dan sedang dilakukan baik oleh badan internasional maupun oleh pemerintah Indonesia.

Di beberapa kawasan, seperti Asia Selatan, hak-hak dan perlindungan terhadap pekerja anak masih tidak diperhatikan. Status sebagai pekerja anak terkesan sebagai buruh yang terpasung. Mereka tidak memperoleh jaminan-jaminan normatif sebagai layaknya pekerja pada umumnya. Kalaupun diperoleh, jaminan itu tidak sama besar dengan yang diterima oleh pekerja dewasa.

Beberapa peraturan dan UU yang menyangkut tentang pekerja anak sebenarnya telah ada sejak dahulu, terutama yang telah dilakukan oleh badan dunia tentang perburuhan ILO (*International Labor Organization*). Sejak awal berdirinya pada 1919, ILO telah menetapkan pada preambule konstitusinya tentang masalah pekerja anak. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa masalah pekerja anak merupakan masalah yang perlu segera ditangani. Namun demikian, karena kompleksitas permasalahan serta keterbatasan ILO, maka ILO belum dapat menangani persoalan pekerja anak secara komprehensif dan konkrit. Penanganan yang dilakukan baru terbatas pada pelaksanaan berbagai macam studi mengenai masalah pekerja anak.

Sikap ILO terhadap persoalan pekerja anak semakin tegas, dengan dikeluarkannya konvensi ILO No. 138/1973. Konvensi ini memberi batasan minimum untuk usia bekerja adalah 15 tahun. Untuk negara-negara berkembang, peraturan ini diperlunak dan batasan umur pekerja menjadi 14 tahun. Konvensi ini telah diratifikasi oleh 44 negara, namun pemerintah Indonesia belum meratifikasinya.

Keseriusan ILO terhadap penanganan pekerja anak lebih dipertegas melalui program khusus yang disebut dengan "*The International Programme on the Elimination of Child Labor (IPEC)*". Program ini didirikan pada 1990 dengan bantuan dana dari Pemerintah Jerman. Program IPEC dimulai dengan 6 negara peserta, yaitu Indonesia, India, Thailand (di Asia), Turki (Eropa/Asia), Brazilia (Amerika Latin), dan Kenya (Afrika). Realisasi program IPEC di Indonesia dimulai sejak 1992 sejak ditandatanganinya MOU

antara Pemerintah Indonesia dan Direktur Jenderal ILO.¹³

Dalam pelaksanaan programnya di masing-masing negara, ILO/IPEC dalam hal ini bertindak sebagai *catalyst* saja. Sejak awal pelaksanaannya, ILO/IPEC percaya bahwa penanganan dan penanggulangan secara tuntas masalah pekerja anak ini hanya dapat dilakukan oleh negara dan masyarakat yang bersangkutan. ILO/IPEC hanya membantu menciptakan suatu iklim yang kondusif bagi tumbuhnya berbagai program model penanggulangan pekerja anak, serta (secara bertahap) terciptanya suatu peraturan dan program-strategi yang tepat bagi penanggulangan pekerja anak di masing-masing negara dengan mengacu pada standar internasional yang telah disepakati bersama.

Saat ini lebih dari 15 negara ikut serta dalam program IPEC. Pendanaan program ini tidak hanya dibantu oleh pemerintah Jerman saja tetapi juga oleh negara-negara lainnya, seperti Spanyol, Amerika Serikat, Perancis, Norwegia, dan Belgia.

Di Indonesia, pelaksanaan peraturan yang menyangkut masalah pekerja anak juga telah dilakukan, di antaranya pada zaman Hindia Belanda. Melalui Ordonansi 17 Desember 1925 ditetapkan bahwa anak usia di bawah 12 tahun tidak diperkenankan untuk bekerja. Batasan tersebut kemudian berubah pada Lembaran Negara No. 8/1949 (dari 12 tahun menjadi 14 tahun).

Pemerintah Indonesia melalui UU No. 1/1951 yang mengatur tentang perbedaan antara "pekerja remaja dan pekerja anak." Pekerja remaja adalah mereka yang berusia antara 14-18 tahun, sedangkan pekerja anak adalah mereka yang berusia di bawah 14 tahun. UU ini mengatur pelarangan anak-anak untuk bekerja dan menetapkan batasan usia untuk mereka yang akan bekerja di pekerjaan berat dan berbahaya minimum berusia 18 tahun.

Pada 1987, Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan peraturan Menteri No. PER-01/MEN/1987 tentang perlindungan terhadap anak-anak yang terpaksa bekerja. Peraturan ini mengizinkan anak-anak di bawah usia 14

tahun yang terpaksa bekerja untuk baik membantu keluarga maupun memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Peraturan tersebut juga mensyaratkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak-anak harus memenuhi ketentuan: (a) Anak-anak tidak diperbolehkan bekerja lebih dari empat jam sehari; (b) Anak-anak tidak dipekerjakan pada malam hari; (c) Pengusaha harus memberikan upah sesuai dengan peraturan pengupahan yang berlaku.

Peraturan pemerintah ini sebenarnya telah memberi perlindungan yang cukup terhadap anak-anak yang terpaksa bekerja. Hanya saja, usaha pemberdayaan (*enforcement*) perlu lebih digalakkan. Selain itu, kepada para pengusaha diminta untuk bekerja sama dengan berbagai pihak agar anak-anak yang terpaksa bekerja mendapat kesempatan menikmati pendidikan.

Anak Sebagai Harapan Masa Depan

Mencermati semua uraian pada bagian sebelumnya, maka sudah saatnya pemerintah dan masyarakat secepat mungkin melakukan pemberdayaan terhadap mereka sebagaimana kodratnya sebagai anak-anak.

Mengentaskan mereka dari kebodohan dan keterbelakangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya haruslah menjadi prioritas. Selain itu, pendidikan dalam keluarga juga memegang peranan penting kepada si anak. Peran orangtua dalam mengasuh dan mendidik anak harus dilakukan secara intensif.

Semua ini bertolak dari pemikiran bahwa anak merupakan modal utama kehidupan bangsa sekaligus sebagai generasi penerus di masa depan. Mereka akan tumbuh menjadi remaja dan pemuda yang merupakan calon-calon pemimpin masyarakat dan negara di kemudian hari.

Karena itu, anak berhak mendapat perlindungan dan bimbingan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Semua itu dilakukan agar mereka dapat tumbuh secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Setiap anak harus diberikan kesempatan dan bantuan (dana dan daya) untuk mengikuti pendidikan. Mereka berhak untuk

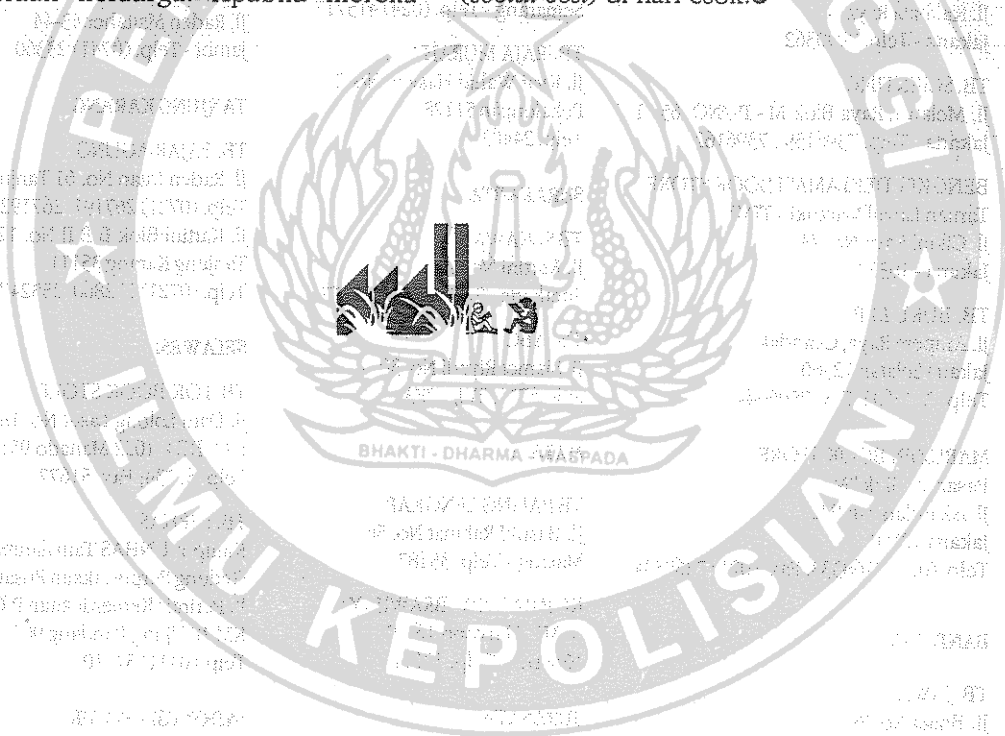
mendapat perlindungan sehingga dapat hidup aman, damai dan tenteram dalam keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat.

Mereka juga berhak mendapat perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Realisasinya pemerintah wajib memberikan sanksi berat terhadap perusahaan-perusahaan yang masih memperdaya pekerja anak. Untuk itu, peraturan (perundangan) dalam ketenagakerjaan perlu mencantumkan masalah pekerja anak sebagai salah satu sasaran sentral.

Pemerintah dan masyarakat juga perlu terus menggalahkan program Gerakan Nasional Orangtua Asuh (GN-OTA) dan pengentasan kemiskinan melalui usaha memberdayakan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Apabila mereka

sudah sejahtera, maka akan memperkecil jumlah anak-anak yang bekerja dan dapat bersekolah kembali. Sedangkan untuk para pengusaha, wajib kiranya memberikan pendidikan non-formal lengkap dengan berbagai sarana kepada para pekerjanya.

Kalau kita tidak segera berusaha mengendalikan kemiskinan dan keluarga miskin, serta dalam waktu yang bersamaan tidak membuat rambu-rambu yang jelas terhadap para pengguna jasa pekerja anak, maka pekerja anak di Indonesia akan masih selalu ada. Karena itu, sebenarnya penentu pilihan ada pada kita sendiri. Apakah anak akan kita jadikan sebagai aset di masa depan dengan segala persiapannya ataukah sebagai liabilitas (*social cost*) di hari esok. ●



Semua Buku LP3ES Ada di Sini

**Anda dapat memperoleh buku LP3ES
secara lengkap di Counter LP3ES ini:**

JAKARTA

TB. Sari Agung
Toserba "Sarinah", lantai V
Jl. M.H. Thamrin No. 11
Jakarta 10350 - Telp. 320096 ; 323008.

JAKARTA BOOK CENTER

Kalibata Mall
Jl. Kalibata Raya
Jakarta - Telp. 7990362

TB. SCIENTIFIC

Jl. Melawai Raya Blok-M - IV/NO. 65 - B.7
Jakarta - Telp. 7396159 ; 7396162

BENGKEL DEKLAMASI BOOK STORE

Taman Ismail Marzuki (TIM)
Jl. Cikini Raya No. 73
Jakarta - 10330

TB. BUKU I.I.P

Jl. Ampera Raya, Cilandak
Jakarta Selatan 12560
Telp. 7806602, Fax. 7806944

MARUZEN BOOK STORE

Pasaraya Blok "M"
Jl. Iskandarsyah II/2
Jakarta 12160
Telp. (021) 7268333; Fax: (021) 7268334

BANDUNG

TB. JAWA

Jl. Braga No. 79
Bandung - Telp. 431087

INTERUNIVERSITY BOOK STORE

Jl. Braga No. 32
Bandung - Telp. (022) 436874

KOPERASI MAHASISWA "UNPAD"

Jl. Dipati Ukur No. 48
Bandung - Telp. 2506639

TB. IQRO

Jl. Terusan Cisokan Dalam No. 24
Brigjen Katamsong Bandung
Telp. (022) 774838

SEMARANG

TB MERBABU

Jl. Pandanaran 108-110
Semarang - Telp. 319562

KOPERASI MAHASISWA UNDIP

Jl. Imam Barjo No. 1
Kampus UNDIP
Semarang - Telp. (024) 415717

TB. RAJA MURAH

Jl. Kyai Wahid Hasyim No. 2
Pekalongan 51128
Telp. 24463

SURAKARTA

TB SEKAWAN

Jl. Kartini No. 14
Surakarta - Telp. (0271) 37377

TB. ABC

Jl. Slamet Riyadi No. 30-A
Solo 5711; Telp. 7832

MALANG DHARMA - WASPADA

TB PALING LENGKAP

Jl. Basuki Rahmat No. 56
Malang - Telp. 35487

KOPMA UNIV. BRAWIJAYA

Jl. MT. Haryono 161 B
Malang - Telp. 53621

SURABAYA

TB URANUS

Jl. Nggagel Jaya No. 91
Surabaya - Telp. 581388

TB SARI AGUNG

Jl. Tunjungan No. 5
Surabaya - Telp. 43916 ; 41228

TB. MEDAYU AGUNG

Komplek Perumahan Kosagraha
Jl. Medayu Selatan No. 6 (IV/D-6)
Medokan Ayu - Rungkut Surabaya 60295
Telp. (031) 8703505; Fax. (031) 8438813

JAMBI

TB GLORIA

Jl. Raden Mattaher 43-44
Jambi - Telp. (0741) 23360

TANJUNG KARANG

TB. FAJAR AGUNG

Jl. Raden Intan No. 61 Tanjung Karang
Telp. (0721) 267191, 267192
Jl. Kartini Blok B B II No. 12-17
Tanjung Karang 35111
Telp. (0721) 252860, 253247, 264696

SELAWESI

TB. LOK BOOK STORE

Jl. Datu Lolong Lasut No. 18
P.O. BOX 1022 Manado 95122
Telp. 52734; Fax. 51672

TB. LEPHAS

Kampus UNHAS Tamalanrea Lt. 1
Gedung Perpustakaan Pusat
Jl. Perintis Kemerdekaan P.O BOX 1580
KM 10 Ujung Pandang 90015
Telp. (0411) 510101

INDONESIA TIMUR

TB. LABOR

Jl. Sam Ratulangi No. 5
Jaya Pura - Irian Jaya 99111
Telp. (0967) 35093; Fax. (0967) 33173

TB. SUCI

Jl. Jenderal Sudirman 110
Kupang - NTT; Telp. 31006

Pustaka LP3ES Indonesia
Membangun Masyarakat Cerdas